

***Antecedent Variable* Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo  
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah  
Kabupaten Wonosobo)**

Nanang Agus Suyono <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an

<sup>1)</sup> [suyono.na07@gmail.com](mailto:suyono.na07@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Variabel independennya adalah perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran (X2), pengadaan barang dan jasa (X3), komitmen manajemen (X4), lingkungan birokrasi (X5), kompetensi sumber daya manusia (X6) sedangkan variabel dependen adalah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Komitmen manajemen, Lingkungan birokrasi, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Besarnya pengaruh keenam variabel tersebut terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 96,3 % sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

**Kata kunci :** Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

**Abstract**

*This study aims to analyze the factors that influence the budget absorption of regional expenditure (APBD) in the Wonosobo Regency. The data used in this research are primary data and data collection is carried out directly by using questionnaire.*

*The research method used is a quantitative method with multiple regression analysis. The dependent variables are budget planning (X1), implementation of funding facilities (X2), procurement of goods and services (X3), commitment to infrastructure (X4), environment of microcrasia (X5), competence of human resources (X6) while dependent variables are absorbing income and regional expenditure (AP4). The results showed that budget planning, budget execution, procurement of goods and services, management commitment, bureaucratic environment, human resource competence had a positive effect on the budget absorption of regional expenditure (APBD) a. The magnitude of the effect of these variables on the absorption of regional income and expenditure budget (APBD) which can be explained by the coefficient of determination is 96.3% while the 3.7% contribution is influenced by other factors outside the study.*

*Keywords: Budget Planning, Budget Execution, Procurement of Goods and Services, Management Commitments, Bureaucratic Environment, Human Resources Competence.*

**1. PENDAHULUAN**

Dalam era otonomi daerah menggambarkan bahwa siklus keuangan yang semula berawal dari pemerintahan pusat sekarang diserahkan pengelolaanya kepada pemerintah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang independen untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dalam menentukan anggaran dan menggunakan anggaran, menentukan aparatur keadminstrasian serta menyusun dan melaksanakan pengendalian intern sesuai dengan kewenangan yang diperoleh . Hal ini sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,

bahwa otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Anak Agung dkk, 2013).

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Peraturan menteri keuangan nomor 249/pmk.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) (Bastian, 2006 dalam Ledy S.Gagola dkk 2016).

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawaban anggaran. Pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah dimulai dengan ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran yang berisi sasaran yang hendak dicapai, program dalam kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan (Agus Kirnanda, 2016). Dengan adanya APBD, diharapkan pemerintah daerah lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang beragam sesuai dengan *preferensi* masyarakat. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan apa saja yang harus dikeluarkan selama satu tahun. (Sanjaya, 2018).

Permasalahan yang terjadi seputar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Wonosobo adalah rendahnya penyerapan anggaran. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya penyerapan anggaran dari tahun ke tahun masih belum memuaskan. Hal ini terlihat dari tidak proposionalnya pola penyerapan anggaran belanja pemerintah tahun 2016-2018 seperti terlihat dalam tabel 1.1. Pada Tabel 1.1 terlihat pola penyerapan anggaran belanja tahun 2016 sampai 2018, yaitu rendahnya penyerapan anggaran pada karesidenan wilayah kedu yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 adalah 87,05 %, pada tahun 2017 adalah 83,21 % dan pada tahun 2018 adalah 83,35 % (Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Wonosobo).

Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2015) menyatakan bahwa, penetapan pola penyerapan anggaran ideal berdasarkan karakteristik belanja diharapkan mampu mengkonsolidasikan pelaksanaan kegiatan lebih tertib dan berorientasi kepada capaian *output*, menjamin efektivitas program-program pro rakyat, mendorong belanja infrastruktur tepat waktu namun rasional, dan mengoptimalkan peran belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan kegiatan dan kucuran belanja dapat menggerakkan ekonomi sejak awal tahun, mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. Realisasi anggaran wilayah Kedu Tahun (LRA 2016 sampai 2018)**

Kabupaten	% 2016	% 2017	% 2018
Pemerintah Kabupaten Magelang	99,81%	93,07%	88 %
Pemerintah Kabupaten Temanggung	91,47%	92,00%	92,86 %
Pemerintah Kabupaten Kebumen	90,98%	87,33%	89,53 %
Pemerintah Kabupaten Purworejo	95,95%	91,07%	87,99 %
Pemerintah Kabupaten Wonosobo	87,05%	83,21%	83,35 %

Sumber : Laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2016 sampai 2018, diolah, 2019

Penyerapan anggaran yang rendah disebabkan adanya revisi anggaran seperti penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah (BPKP.go.id). Kegagalan target penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan (Cardisiawan, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah kabupaten Wonosobo adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Perencanaan anggaran adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktifitas (Sunyoto dan Burhanudin, 2015). Perencanaan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selanjutnya disebut Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA-SKPD) setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut ditetapkan dalam UU nomer 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendanai pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sunyoto dan Burhanudin, 2015). Penyerapan anggaran dapat didefinisikan sebagai kemampuan unit pengeluaran (satuan kerja) pemerintah untuk memanfaatkan anggaran yang telah ditentukan untuk mencapai output yang direncanakan secara tepat (*Ministry of Finance, Planning and Economic Development Uganda*, 2011).

Pelaksanaan anggaran adalah prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktifitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (Mangundiharjo, 1996 dalam Kumorotomo, 2005). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan dalam internal suatu kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran karena dengan adanya pelaksanaan anggaran yang dipahami oleh pengelola keuangan daerah tidak ada lagi keraguan untuk merealisasikan anggaran karena sudah ada aturan yang jelas dan diharapkan serapan anggaran akan meningkat. Penelitian Kuswoyo (2011) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan sebuah instansi pemerintah (Yahya, dkk 2012). Mayoritas lambatnya serapan anggaran tersebut terjadi dikarenakan proses tender yang memakan waktu beberapa bulan, hal ini dikarenakan ada beberapa proses teknis dan non teknis yang harus dijalankan dan harus melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan UU. Proses tender merupakan salah satu penyebab dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lambatnya proses lelang dan konflik-konflik yang terjadi selama proses tender berlangsung semakin memperparah lamanya waktu yang di butuhkan untuk implementasi anggaran (Abdullah, 2013). Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Proporsi anggaran pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih dari 30% sampai 40%, porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian (*Indonesian Procurement Watch*, 2011). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran (Herriyanto, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komitmen manajemen sebagai hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan realisasi yang dipandang penting dan bernilai jangka panjang (Sheth dan Mittal, 2004 dalam Dwi Antoro, 2014). Komitmen biasanya tercermin dalam perilaku kooperatif dan tindakan aktif untuk

tetap mempertahankan relasi yang telah terbina. Hasil penelitian Robbins (2003) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen yang tinggi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen manajemen merupakan peran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran dengan berbagai upaya untuk mencapai target penyerapan APBD yang maksimal. Komitmen manajemen merupakan kegiatan melakukan dan mempertahankan perilaku yang membantu bawahan untuk mencapai suatu tujuan (Cooper, 2006). Komitmen manajemen yang tinggi dapat menjadi dasar untuk *intervensi* sehingga organisasi dapat mencapai penyerapan anggaran secara maksimal (Juliani dan Sholihin, 2014)..

Lingkungan birokrasi merupakan dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien, untuk setiap posisi atau jabatan didalam organisasi harus ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya, kebutuhan informasi, dan aktivitas teknis yang dilakukan. Bahwa organisasi akan berjalan efektif jika lingkungan yang dihadapi stabil dan tugas-tugas yang dilakukan dapat ditangani dengan mekanisme yang bersifat rutin, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan internal dan eksternal organisasi. Kondisi internal pegawai tersebut senantiasa berubah dan berkembang, sehingga membentuk sebuah pembelajaran yang muncul dapat diantisipasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi instansi-instansi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah, teknologi, kondisi sosial ekonomi yang mengalami dinamika dari waktu ke waktu (Natheus dan Sulistyani, 2011).

Menurut Widodo (2011) kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumberdaya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut (Azhar, 2007 dalam Eko Saryanto, 2017). Penelitian yang dilakukan Ahmad Azmi (2015) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan APBD. Karena pegawai yang berkompeten dan ahli di bidang penatausahaan keuangan, akan mempengaruhi dalam penyerapan APBD karena karakteristik individu memiliki kemampuan dan digunakan dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan sumber daya manusia yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian akan lambat karena ketidakmampuan sumber daya manusia dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Wonosobo sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah rendahnya penyerapan anggaran di pemerintah Kabupaten Wonosobo. Maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (2) Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (3) Apakah pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (4) Apakah komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (5) Apakah lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo? (6) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo?

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk membuktikan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2) Untuk membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten



Wonosobo. (3) Untuk membuktikan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (4) Untuk membuktikan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (5) Untuk membuktikan lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (6) Untuk membuktikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD pemerintah daerah harus terlebih dulu menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD SKPD) (Purtanto, 2015). Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran (Agus Kirnanda, 2016).

Menurut Mardiasmo (2009) kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penyerapan anggaran adalah suatu proses pembuatan anggaran melalui prosedur dan mekanisme persiapan/perencanaan, implementasi dan monitoring. Penganggaran sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara karena akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Untuk menciptakan penganggaran yang baik diperlukan kepemimpinan yang responsif, SDM yang berkualitas, informasi yang akurat dan terpercaya, perencanaan yang lengkap dan terinci, monitoring atas jadwal rencana pembayar yang sesuai dengan rencana anggaran. Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

### 2.2. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah proses pendefinisian tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengkoordinasi berbagai aktifitas (Sunyoto dan Baharudin, 2015). Perencanaan anggaran merupakan tahap awal dalam mekanisme pengelolaan anggaran. Di wilayah pemerintah Kabupaten Wonosobo mengalami kendala dalam hal perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran masih mengalami kendala ketidaksesuaian antara anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA dengan daftar Isian pelaksanaan anggaran yang disahkan (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo).

Permasalahan lain yang membentuk faktor perencanaan adalah daftar isian pelaksanaan anggaran perlu direvisi karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Tingginya frekuensi revisi daftar isian pelaksanaan anggaran menunjukkan buruknya perencanaan anggaran. Revisi anggaran menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran karena pelaksanaan anggaran harus menunggu revisi anggaran selesai. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agus Kirnanda (2016) dan Hendrik Samosir (2017), yang menyebutkan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan perencanaan anggaran memberi kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran. Setiap perencanaan anggaran menjadi landasan dalam pelaksanaan koordinasi dan monitoring implementasi rencana dalam maksud menghasilkan setiap sasaran hasil kinerja pembangunan. Perencanaan yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggota atau karyawan berada dalam satu koordinasi, anggota atau karyawan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan program (Agus Kirnandan, 2016). Dengan demikian perencanaan anggaran dapat memberikan peningkatan kualitas

dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 2.3 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran adalah merupakan suatu alat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap keuangan suatu organisasi dan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ari Romadoni, 2014). Besarnya pelaksanaan anggaran akan berdampak pada semakin meningkatnya penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran akan mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Eisenstandt, 1959 dalam Ledy S. Gagola, 2016)

Hasil penelitian dari Ledy S Gagola dkk (2016) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Basri (2013) membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan anggaran baru dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disahkan menjadi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran yang optimal yaitu capaian keluaran riil, konsistensi rencana penarikan dana dan efisiensi akan meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena jika pelaksanaan anggaran meningkat maka semakin besar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 2.4 Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, bangunan, jalan rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan pengadaan dalam hal untuk mendapatkan barang dan jasa (Yahya, dkk 2012).

Penelitian Lady S Gagola dkk, (2016) membuktikan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agus Kirnanda (2016) yang menyebutkan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran (Herriyanto, 2012). Proporsi anggaran pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih dari 30% sampai 40% (*Indonesia Procurement Watch*, 2011). Porsi yang besar tersebut dikarenakan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Karena realisasi atas pembayaran kegiatan merupakan serapan anggaran (Herriyanto, 2012)

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Semakin tingginya proses pengadaan barang dan jasa maka semakin besar pencairan anggaran sehingga penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin meningkat. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 2.5 Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen atau komitmen organisasi sebagai nilai personal yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada perusahaan. Komitmen manajemen merupakan salah satu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak suka terhadap organisasi tempat bekerja (Khikmah, 2005). Komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan organisasi agar dapat

meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan (Allen dan Meyer dalam Silfia, 2013).

Lady S Gagola dkk, (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didukung penelitian yang dilakukan oleh Kadek Miya Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan komitmen manajemen merupakan kegiatan melakukan dan mempertahankan perilaku yang membantu bawahan untuk mencapai suatu tujuan (Cooper, 2006). Komitmen manajemen merupakan peran kepala SKPD selaku pengguna anggaran dengan berbagai upaya untuk mencapai target penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen manajemen yang diterapkan dalam suatu instansi maka semakin meningkatkan kinerja individu dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H4 : Komitmen manajemen berpengaruh positif pada penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 2.6 Lingkungan Birokrasi

Lingkungan birokrasi merupakan dasar pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien, untuk setiap posisi atau jabatan didalam organisasi harus ditentukan secara jelas wewenangnya, kebutuhan informasi, dan aktifitas teknis yang dilakukan, mereka yang menduduki posisi tersebut tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditentukan (Hatch, 1997 dalam Mangihot, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ledy S Gagola (2018) membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juliani (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lingkungan birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran karena adanya dukungan dan kekondusifan kondisi dan keadaan di SKPD dapat mendukung penyerapan anggaran menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan lingkungan birokrasi yang baik ditandai dengan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan akan membuat pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lancar (Eisenstadt, 1959). Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H5 : Lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

## 2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2011). Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik bahwa individu memiliki kemampuan dan digunakan dengan cara yang konsisten sesuai untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, aspek citra diri, motiv sosial, sifat, pola pikir dan cara berfikir, perasaan dan pelaksanaan (Dubois, 2004 dalam Ahmad azmi, 2015).

Muhammad Iqbal (2018) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Didukung oleh Kadek Mia Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi terhadap pencapaian tujuannya dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan (Widodo, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan penyerapan anggaran. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H6 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Wonosobo. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Data Sampel Penelitian di SKPD Kabupaten Wonosobo**

No.	Uraian	Jumlah SKPD	Jumlah Sampel
1.	Badan	4 SKPD	8 pegawai
2.	Dinas	15 SKPD	30 pegawai
4.	Sekretariat	8 SKPD	16 pegawai
5.	Inspektorat	1 SKPD	2 pegawai
6.	Kantor	2 SKPD	4 pegawai
	Jumlah	30 SKPD	60 pegawai

Sumber : Data diolah, 2019

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, kriteria sampel didasarkan pada tujuan penelitian, dimana kapasitas yang dimiliki oleh pegawai pengelola anggaran pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah diyakini mampu menjawab permasalahan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Keuangan (kasubbag) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  
Memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana dan program kerja keuangan SKPD, menyusun rincian rancangan kebutuhan anggaran, perubahan, dan laporan keuangan SKPD.
- b. Bendahara Pengeluaran / pelaksana/ staff keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y : Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah

$\alpha$  : Nilai konstan

$X_1$  : Perencanaan Anggaran

$X_2$  : Pelaksanaan Anggaran

$X_3$  : Pengadaan Barang dan Jasa

$X_4$  : Komitmen Manajemen

$X_5$  : Lingkungan Birokrasi

$X_6$  : Kompetensi Sumber Daya Manusia

$\beta$  : Koefisien arah regresi

e : Error



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### a. Analisis Data

##### 1) Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil pengolahan data menggunakan program SPSS V.17 yang dirangkum melalui tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Pengujian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2,568	,733		-3,503	,001
Perencanaan Anggaran	,120	,039	,104	3,108	,003
Pelaksanaan Anggaran	,096	,031	,083	3,118	,003
Pengadaan Barang dan Jasa	,111	,034	,089	3,272	,002
Komitmen Manajemen	,067	,031	,058	2,193	,033
Lingkungan Birokrasi	,912	,050	,698	18,308	,000
Kompetensi SDM	,255	,043	,230	5,955	,000

a. Dependent Variable: APBD

Sumber : Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,568 + 1,20 \text{ PRA} + 0,096 \text{ PLA} + 0,111 \text{ PBJ} + 0,067 \text{ KM} + 0,912 \text{ LB} + 0,255 \text{ KSDM} + 0,303$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar -2,568 (negatif) menunjukkan bahwa tanpa dipengaruhi variabel bebas, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, kompetensi SDM maka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rendah.
- Berdasarkan tabel 4.1, untuk perencanaan anggaran terhadap penyerapan APBD ( $H_1$ ) memiliki koefisien 0,120 dan signifikan pada 0,003. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara perencanaan anggaran terhadap penerapan APBD, diterima. Artinya jika perencanaan anggaran baik akan mendorong meningkatnya penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan APBD ( $H_2$ ) memiliki koefisien 0,096 dan signifikan pada 0,003. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan APBD, diterima. Dengan pelaksanaan anggaran yang baik maka akan meningkatkan penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan APBD ( $H_3$ ) memiliki koefisien 0,111 dan signifikan pada 0,002. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan APBD diterima. Artinya semakin tingginya proses pengadaan barang dan jasa maka semakin besar pencairan anggaran sehingga penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin meningkat. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh komitmen manajemen terhadap penyerapan APBD ( $H_4$ ) memiliki koefisien 0,067 dan signifikan pada 0,033. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif komitmen manajemen terhadap penyerapan APBD, diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen manajemen maka akan meningkatkan penyerapan APBD. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.

- f Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD ( $H_5$ ) memiliki koefisien 0,912 dan signifikan pada 0,000. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara lingkungan birokrasi terhadap penyerapan APBD, diterima. Artinya semakin baik lingkungan birokrasi maka penyerapan APBD akan meningkat. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- g Berdasarkan tabel 4.1, untuk pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan APBD ( $H_5$ ) memiliki koefisien 0,255 dan signifikan pada 0,000. Karena memiliki tingkat signifikan kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompetensi SDM terhadap penyerapan APBD, diterima. Artinya semakin baik kompetensi SDM maka penyerapan APBD akan meningkat. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan

## b. Pembahasan

### 1) Pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Agus Kirnanda (2016) dan Hendrik Samosir (2017), yang menyebutkan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran pada SKPD kabupaten Wonosobo sudah baik. Perencanaan anggaran yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggota atau karyawan berada dalam satu koordinasi, anggota atau karyawan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan program sehingga perencanaan anggaran dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

### 2) Pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Ledy S Gagola dkk (2016) dan Ramlah Basri (2013) yang membuktikan bahwa membuktikan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya pelaksanaan anggaran akan berdampak pada semakin meningkatnya penyerapan anggaran. Apabila pelaksanaan anggaran yang optimal yaitu capaian keluaran riil, dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien akan meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 3) Pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lady S Gagola dkk, (2016) dan Agus Kirnanda (2016) yang menyebutkan pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini membuktikan bahwasemakin tingginya proses pengadaan barang dan jasa maka semakin besar pencairan anggaran sehingga penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin meningkat. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### 4) Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini didukung oleh Lady S Gagola dkk, (2016) dan Kadek Miya Ranisa

Putri dkk (2017) membuktikan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini membuktikan semakin tinggi komitmen manajemen yang diterapkan dalam suatu instansi maka semakin meningkatkan kinerja individu dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila manajemen secara konsisten menetapkan strategi dalam proses mencapai tujuan yang diharapkan maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan penyerapan APBD.

**5) Pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Didukung dari penelitian Ledy S Gagola (2018) dan Juliani (2014) membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan birokrasi yang baik ditandai dengan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan sehingga dengan adanya lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lancar.

**6) Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD. Penelitian ini didukung oleh penelitian Muhammad Iqbal (2018) dan Kadek Mia Ranisa Putri dkk (2017) membuktikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi terhadap pencapaian tujuannya dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga kompetensi sumber daya manusia yang baik memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan penyerapan anggaran.

**5. KESIMPULAN**

Hasil pengujian statistik tentang pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan APBD dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD ( $H_1$  diterima). Artinya perencanaan anggaran yang baik, ditandai dengan perencanaan disusun sesuai dengan tujuan organisasi/instansi, tepat sasaran, anggota atau karyawan berada dalam satu koordinasi, anggota atau karyawan menjalankan fungsinya sesuai dengan perencanaan program sehingga perencanaan anggaran dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Variabel pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD ( $H_2$  diterima). Artinya besarnya pelaksanaan anggaran akan berdampak pada semakin meningkatnya penyerapan anggaran. Apabila pelaksanaan anggaran yang optimal yaitu capaian keluaran riil, dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien akan meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Variabel pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD ( $H_3$  diterima). Artinya bahwa semakin tingginya proses pengadaan barang dan jasa maka semakin besar pencairan anggaran sehingga penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah semakin meningkat. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- d. Variabel komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD ( $H_4$  diterima). Artinya semakin tinggi komitmen manajemen yang diterapkan dalam suatu instansi,

maka semakin meningkatkan kinerja individu dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila manajemen secara konsisten menetapkan strategi dalam proses mencapai tujuan yang diharapkan, maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta penggunaan yang lebih baik atas informasi kinerja yang dihasilkan sehingga akan meningkatkan penyerapan APBD.

- e. Variabel lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD (H<sub>5</sub> diterima). Artinya lingkungan birokrasi yang baik yang ditandai dengan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka didalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan sehingga dengan adanya lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi lancar.
- f. Variabel kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD (H<sub>6</sub> diterima). Artinya bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi akan menentukan kemampuan organisasi terhadap pencapaian tujuannya dengan dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga kompetensi sumber daya manusia yang baik memiliki dampak yang kuat dalam meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kirnanda, 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Binjai dengan Perubahan Anggaran sebagai Variabel Moderating Satuan Kerja Perangkat . Tesis. Universitas Sumatera Utara
- Anak Agung Ngurah Bagus Dhermawan I Gede Adnyana Sudibya I Wayan Mudiarta Utama, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Study Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar). Jurnal. Universitas Udayana
- Ari Romadoni, 2014. Pelaksanaan Anggaran mengenai Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Jurnal
- Azmy Ahmad, 2015. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Mencapai Career Ready Professional. Jurnal. Universitas Tanri Abeng.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017*. Jepara : BPS.
- Beamish, P. W. 1990. The Internationalization Process for Smaller Ontario Firms. *A Research Agenda, Research in Global Business Management, 1, 77-92* .
- Bilson, 2005. Analisis Multivariat Pemasaran. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Cardisiawan, 2009 Putri, Carlin Tasya. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah provinsi Bengkulu, Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu Qanun Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2013.
- Cooper, 2006. *Business Research Methods 5th et.* London, Richard D Irwin, Inc.
- Eisenstadt, 1959. Revolusi dan Transformasi Masyarakat. 1986. Jakarta: Rajawali Press.
- Hendrik Samosir, 2017. Analisis Pengaruh Faktor Perencanaan terhadap Peyerapan. Jurnal.
- Herriyanto, Hendris. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerjakementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia
- Herryanto, 2012. Sistem Informasi E-Procurement Pada Pdam Surya Sembada Kota Surabaya. Jurnal. STIKOM Surabaya
- Imam Ghozali, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Keempat BP UNDIP Semarang.
- Kadek Mia Ranisa Putri, 2017. Pengaruh Prencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran. Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha Singareja.
- Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan, 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi.



- Mangihot, 2017. Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Jurnal. Unpad
- Natheus dan Sulistyani, 2011. Memahami Good Governance (dalam perspektif sumber daya manusia). Yogyakarta: Graha Media
- Purtanto, 2015 Rencana Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jurnal. Universitas Sumatera Utara
- Robbins, 2003. Perilaku Organisasi (*Organizational Behavior*). Edisi Kedua Belas Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Sunyoto dan Baharudin, 2015. Teori Perilaku Keorganisasian. Jakarta. Penerbit CAPS
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Bisnis dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Widodo, 2011. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jurnal. Universitas Tanri
- Yahya, 2012. Sistem Informasi E-Procurement. Jurnal. STIKOM Surabaya.
- .